

ANALISIS SISTEM MANAJEMEN ASET DALAM PENGURUSAN INVENTARISASI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PASURUAN: STUDI DIGITALISASI ASET

Tania Dinda Ayu Maulidyah¹, Khumaidi²
Universitas Yudharta Pasuruan^{1,2}
taniadindaayy@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset dalam proses inventarisasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan secara digital guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada tata kelola aset dan faktor penghambat dalam implementasi sistem manajemen aset berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital melalui SIDIA dan E-Inventaris mampu mendukung pencatatan, verifikasi, pemantauan, serta pemusnahan aset secara real-time dengan fitur audit trail yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat hambatan terkait ketergantungan pada dokumen fisik dan adaptasi sumber daya manusia. Simpulan penelitian ini adalah bahwa pengelolaan aset di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah bertransformasi secara signifikan menuju sistem digital yang efisien dan terintegrasi, namun proses digitalisasi masih dalam tahap transisional yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset, Inventarisasi Digital, SIDIA, E-Inventaris, Digitalisasi Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to analyze digital asset management during the inventory process at the Pasuruan Regency Manpower Office to improve efficiency and accountability. The research method used is a descriptive qualitative approach, focusing on asset governance and the inhibiting factors in the implementation of a digital-based asset management system. The results show that the implementation of a digital system through SIDIA and E-Inventory supports real-time asset recording, verification, monitoring, and disposal, with an audit trail feature that strengthens transparency and accountability. Although obstacles remain related to reliance on physical documents and human resource adaptation. The study concludes that asset management at the Pasuruan Regency Manpower Office has transformed significantly toward an efficient and integrated digital system. However, the digitalization process is still in a transitional stage that requires continuous improvement.

Keywords: Asset Management, Digital Inventory, SIDIA, E-Inventory, Government Digitalization

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap mekanisme kerja pemerintahan, mendorong institusi publik untuk melakukan perubahan menuju sistem tata kelola yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan efisien. Dalam konteks ini, konsep Digital Governance muncul sebagai jawaban atas kebutuhan reformasi birokrasi, dengan mengedepankan integrasi teknologi digital dalam sistem administrasi pemerintahan untuk menciptakan layanan publik yang cepat, berbasis data, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya merampingkan proses administrasi, tetapi juga memperluas jangkauan akses informasi bagi masyarakat umum dan pemangku kepentingan (Almeida, F., 2020). Digital Governance merupakan bentuk penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang diintegrasikan ke dalam sistem digital, yang diwujudkan melalui penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) yang didukung oleh perangkat keras,

perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan elektronik. Pelaksanaannya juga melibatkan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk para ahli, operator, dan pengguna yang memiliki pemahaman tentang teknologi informasi (brainware) (Azis, 2022 ; Syakur, 2022)

Pada awal penerapan digitalisasi khususnya sektor pemerintahan, sistem yang digunakan umumnya masih manual dan bersifat sentralistik, yang menyebabkan tingginya tingkat birokrasi serta lambannya proses pengambilan keputusan. Seiring waktu, baik di Indonesia maupun secara global, pemerintah mulai beralih dari metode tradisional seperti penyimpanan dokumen dalam buku catatan atau sistem komputer sederhana menuju pemanfaatan sistem digital terintegrasi berbasis internet. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisasi kesalahan manusia, dan menyediakan data secara real-time bagi para pemangku kepentingan. Dinamika tersebut mendorong lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengadopsi teknologi digital yang tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga memperkuat transparansi serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Sementara Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah mengadopsi dua sistem digital utama, yaitu SIDIA (Sistem Informasi Digital Aset) dan E-Inventaris, sebagai bagian dari upaya digitalisasi dalam pengelolaan aset.

SIDIA digunakan sebagai platform untuk mencatat transaksi aset secara waktu nyata (real-time), mulai dari proses pengadaan hingga pendistribusian barang. Sedangkan E-Inventaris berperan sebagai sistem yang merekap seluruh data aset yang dimiliki oleh instansi, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, dengan menyajikan informasi menyeluruh mengenai kondisi, jumlah, serta distribusi aset yang ada. Sistem ini tidak hanya mencatat kegiatan inventarisasi, tetapi juga menyediakan representasi komprehensif mengenai status aset fisik, mulai dari perlengkapan kantor, kendaraan operasional, hingga alat kerja penunjang aktivitas harian. Informasi yang dihimpun dalam E-Inventaris menjadi instrumen penting dalam proses pemantauan, evaluasi, serta perencanaan pemeliharaan aset, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan strategis yang didasarkan pada data yang valid dan berbasis (Haryanto, 2021). Namun, Welchman (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan tata kelola digital bertumpu pada tiga indikator utama, yakni strategi digital, kebijakan digital, dan standar digital. Implementasi yang efektif dari ketiga komponen ini tidak hanya mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan produktif, tetapi juga menjamin terselenggaranya layanan publik yang berkualitas dengan penyampaian informasi yang cepat dan tepat sasaran. Ketiga indikator tersebut menjadi kerangka acuan dalam merumuskan arah strategis, menyusun kebijakan, serta menetapkan standar operasional dalam penerapan tata kelola digital. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan kelangsungan proses transformasi digital, tetapi juga memperluas akses publik terhadap informasi, sekaligus memperkuat kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Almeida, F.,2020).

Meski menawarkan berbagai manfaat, implementasi integrasi antara SIDIA dan E-Inventaris masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan tersebut antara lain meliputi terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai sistem digital, kurang optimalnya infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan kapasitas server, serta kebijakan internal yang masih kaku. Selain itu, pembatasan akses sistem hanya kepada individu tertentu juga turut memperlambat kolaborasi antar unit kerja dan menyebabkan informasi tidak terdistribusi dengan merata. Transformasi digital dalam pengelolaan aset tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga harus disertai dengan reformasi kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan modernisasi infrastruktur pendukung. Penyesuaian kebijakan internal, termasuk mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur pengelolaan barang milik negara, menjadi landasan hukum penting agar setiap aset dapat dikelola secara terstruktur dan efisien.

METODE PENELITIAN

Analisis ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai situasi sosial yang diteliti, khususnya terkait pengelolaan aset dalam proses inventarisasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menangkap makna, dinamika, serta proses yang terjadi secara alami dalam konteks objek penelitian. Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2022), pendekatan deskriptif kualitatif berakar pada paradigma postpositivisme, di mana analisis berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas di lapangan. Penggunaan metode kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali berbagai dimensi fenomena secara lebih fleksibel dan kontekstual. Denzin dan Lincoln (2018) mengemukakan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam menangkap pengalaman dan perspektif informan secara otentik, terutama dalam konteks sosial yang kompleks. Fokus analisis ini dibatasi pada dua ranah utama: (1) tata kelola aset dalam konteks inventarisasi, dan (2) faktor-faktor penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi arah penelitian agar tidak meluas ke luar konteks dan tetap fokus pada permasalahan yang relevan.

Analisis ini dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, yang berlokasi di Jl. Hasyim Asyari No. 1, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, terutama dalam aspek pengelolaan dokumen dan inventarisasi yang menjadi tanggung jawab Bidang Kesekretariatan di instansi tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan yang memahami persoalan secara mendalam, seperti Kepala Dinas, staf teknis, dan pihak terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen institusional, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait manajemen aset, serta laporan-laporan pendukung lainnya yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas dan praktik manajemen aset secara faktual di lapangan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di institusi tersebut. Analisis data dilakukan dengan pendekatan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tiga tahapan utama: pertama, kondensasi data, yaitu proses mereduksi dan menyederhanakan data mentah agar menjadi lebih bermakna; kedua, penyajian data, yaitu menata informasi dalam bentuk visualisasi naratif, tabel, atau matriks untuk mendukung proses interpretasi; dan ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu langkah analitis untuk merumuskan makna, mengidentifikasi pola, dan memastikan validitas temuan. Melalui pendekatan ini, analisis ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan aset di lingkungan Disnaker Kabupaten Pasuruan sekaligus memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem inventarisasi aset di sektor pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Manajemen Aset : Pengurusan Inventarisasi

Implementasi sistem manajemen aset dalam proses inventarisasi di instansi ini dirancang guna menjamin ketepatan dan keterbukaan informasi aset secara menyeluruh. Sistem digital yang digunakan terbagi dalam tiga tahapan utama pendaftaran, pencatatan, dan pemusnahan aset yang saling terhubung untuk menciptakan tata kelola aset yang efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahap didukung oleh prosedur operasional standar dengan mekanisme verifikasi dan pembaruan berkala, memungkinkan proses pemantauan

dilakukan secara real-time sehingga data inventaris senantiasa mencerminkan kondisi terkini. Tahapan pendaftaran merupakan fondasi awal yang sangat penting dalam keseluruhan proses manajemen aset. Dalam tahap ini, seluruh aset yang masuk akan melalui proses identifikasi dan validasi dengan mencocokkannya pada dokumen pendukung seperti nota pembelian, faktur, serta bukti serah terima barang. Prosedur verifikasi awal ini memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem digital tidak hanya terdokumentasi secara terstruktur, tetapi juga memiliki tingkat akurasi dan validitas yang tinggi. Dengan landasan data yang kuat pada tahap ini, aset kemudian dapat langsung disinkronkan dengan modul pencatatan, yang memudahkan pembaruan informasi secara otomatis berkat dukungan teknologi seperti SIDIA dan E-Inventaris.

Setelah integrasi data selesai, tahap pencatatan berfokus pada pemeliharaan informasi aset secara berkelanjutan dan real-time. Tahap ini dilengkapi dengan fitur audit trail yang mencatat seluruh aktivitas perubahan data, termasuk identitas penginput, waktu perubahan, dan jenis modifikasi yang dilakukan, sehingga mendukung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam operasional pengelolaan aset. Apabila suatu aset telah melewati masa pakai optimalnya, maka proses pemusnahan akan dimulai melalui evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan usia pakai, kondisi fisik, dan depresiasi nilai ekonomis. Pengajuan pemusnahan dilakukan secara digital, dan sistem secara otomatis akan mengubah status aset dari "aktif" menjadi "diproses untuk dimusnahkan", sembari mendokumentasikan setiap tahapan proses tersebut secara rinci. Pendekatan ini memungkinkan pembaruan data yang akurat dan berkelanjutan, sehingga mendukung tata kelola aset yang modern dan berbasis efisiensi teknologi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksanaan sistem manajemen aset di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan telah mengembangkan suatu roadmap strategis sebagai bagian dari proses digitalisasi dan reformasi tata kelola aset. Roadmap tersebut mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk pengembangan infrastruktur seperti peningkatan kapasitas server dan kestabilan jaringan, serta penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan yang terstruktur guna memaksimalkan pemanfaatan sistem SIDIA dan E-Inventaris. Temuan ini juga diperkuat melalui hasil wawancara mendalam, di mana Kepala Subbagian Umum menjelaskan bahwa roadmap strategis tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan sistem. Ia menyatakan, "Roadmap strategis ini menjadi pedoman utama kami; setiap langkah terencana dengan target yang terukur sehingga kami dapat segera menyesuaikan strategi jika terdapat ketidaksesuaian antara target dan hasil di lapangan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dengan adanya kejelasan perencanaan, instansi mampu mengantisipasi potensi kendala teknis maupun tantangan dalam adaptasi sumber daya manusia, dengan solusi yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini berkontribusi terhadap efektivitas dan kelancaran proses digitalisasi manajemen aset, yang berjalan dengan lebih efisien dan minim gangguan.

Proses Pendaftaran Aset dan Verifikasi Dokumen

Berdasarkan hasil observasi, masih terlihat adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap penggunaan dokumen fisik sebagai dasar verifikasi, yang menjadi hambatan tersendiri dalam proses digitalisasi. Di beberapa unit kerja, praktik pencatatan manual masih cukup dominan dan belum sepenuhnya tergantikan oleh sistem digital. Para informan menyatakan bahwa peralihan secara menyeluruh menuju sistem berbasis digital tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan waktu dan usaha yang konsisten, khususnya dalam mengubah pola kerja yang sudah terbentuk sejak lama. Untuk mempercepat proses adaptasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan pendampingan teknis menjadi langkah penting. Dengan demikian, setiap pegawai diharapkan mampu mengoperasikan sistem secara optimal, serta mendukung kelancaran integrasi data yang akurat dan efisien. Secara umum, hasil studi

menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kemajuan signifikan dalam hal pendaftaran aset melalui penerapan sistem digital dan penguatan regulasi seperti melalui SK Bupati, hambatan yang bersumber dari budaya kerja manual serta keterbatasan teknis SDM masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui program pelatihan, penyesuaian prosedural, serta peningkatan infrastruktur teknologi guna mendorong terwujudnya transformasi digital secara menyeluruh. Harapannya, langkah-langkah tersebut dapat memastikan pengelolaan aset yang lebih akurat, konsisten, dan efisien dalam lingkup organisasi.

Proses Pencatatan dan Integrasi Data

Setelah data berhasil melewati tahap pendaftaran yang ketat, proses berikutnya adalah integrasi dan sinkronisasi informasi ke dalam sistem digital tingkat lanjut seperti SIDIA dan E-Inventaris. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa setiap pembaruan data dapat tercermin secara langsung dan real time dalam sistem. Berdasarkan hasil pengamatan, strategi integrasi ini dirancang guna memastikan konsistensi informasi di seluruh entri data, di mana data yang telah diverifikasi langsung dikonsolidasikan guna meminimalisasi potensi kesalahan input. Sementara itu, temuan dari wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berperan penting dalam mendukung sinkronisasi otomatis data, sehingga informasi yang tersimpan senantiasa mutakhir dan akurat. Hal ini sangat menunjang pelaksanaan monitoring yang bersifat berkelanjutan. Pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara simultan, sehingga setiap perubahan yang terjadi akan langsung diperbarui tanpa memerlukan proses input manual secara berulang. Selain keunggulan tersebut, sistem SIDIA dan E-Inventaris juga dilengkapi dengan fitur *audit trail*, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap perubahan data. Dengan fitur ini, semua modifikasi terhadap data akan tercatat secara otomatis oleh sistem, sehingga proses pelacakan dan evaluasi terhadap ketidaksesuaian atau kesalahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sistematis. Keberadaan *audit trail* ini tidak hanya mendukung ketepatan data, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola digital (*digital governance*).

Proses Pemusnahan Aset dan Audit Trail

Prosedur pemusnahan aset diawali dengan pelaksanaan evaluasi komprehensif guna mengidentifikasi aset-aset yang dinilai tidak lagi memberikan manfaat optimal dan karenanya perlu dihapus dari sistem. Tahap evaluasi ini menjadi langkah kunci sebelum proses penghapusan dilaksanakan secara formal. Berdasarkan hasil pengamatan, tim penilai aset menjalankan analisis menggunakan sejumlah indikator objektif, termasuk usia aset, kondisi fisik terkini, serta penurunan nilai ekonomis. Setiap aset yang diajukan untuk dimusnahkan diperiksa secara menyeluruh dengan dukungan dokumentasi seperti laporan pemeliharaan, catatan kerusakan, dan riwayat penggunaan. Di lapangan, evaluasi dilakukan tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga mengacu pada penilaian kualitatif oleh teknisi langsung terhadap kondisi aktual aset. Setelah proses evaluasi selesai, tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan pemusnahan aset melalui sistem digital, yakni SIDIA dan E-Inventaris. Penerapan teknologi ini memungkinkan integrasi data secara langsung (*real-time*), sehingga setiap perubahan status aset terdokumentasi secara otomatis tanpa memerlukan entri manual tambahan. Sistem SIDIA dan E-Inventaris juga memiliki fitur *audit trail* yang mencatat seluruh tahapan dalam proses pemusnahan, mulai dari evaluasi awal hingga persetujuan akhir penghapusan aset. Menurut penjelasan dari Bapak Dista, hasil pengamatan menunjukkan bahwa fitur *audit trail* mendokumentasikan informasi secara sangat rinci, meliputi waktu, tanggal, identitas pengguna sistem, dan jenis perubahan data yang dilakukan.

Pencatatan ini memungkinkan proses verifikasi oleh auditor internal maupun eksternal, sehingga akurasi dan integritas data dapat terjaga secara konsisten. Selain prosedur digital, para informan juga menyoroti pentingnya dokumentasi metode fisik pemusnahan aset, seperti penghancuran langsung, proses daur ulang, atau pembuangan sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi operasional. Namun, dalam tahap ini, peneliti belum menemukan bukti dokumentasi yang lengkap terkait metode pemusnahan yang diterapkan, yang menandakan adanya celah dalam aspek pelaporan teknis.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Temuan lapangan menunjukkan bahwa instansi tengah menjalankan proses transformasi signifikan dari sistem manual menuju sistem digital terintegrasi, yang memungkinkan proses pengelolaan aset mulai dari tahap identifikasi hingga pemusnahan dilaksanakan secara otomatis dan presisi tinggi. Transformasi ini menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan efisien, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Keberhasilan langkah ini turut ditopang oleh adanya landasan kebijakan formal yang kuat, terutama melalui dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati, yang tidak hanya memberikan legitimasi hukum tetapi juga menyatukan arah kebijakan seluruh unit kerja dalam implementasi pengelolaan aset yang konsisten. Di samping itu, investasi pada infrastruktur teknologi, seperti peningkatan kapasitas server dan penguatan jaringan internet, menjadi katalis utama dalam mempercepat proses digitalisasi. Perbaikan tersebut memungkinkan sinkronisasi data melalui sistem SIDIA dan E-Inventaris dapat berlangsung secara real time.

Dari sisi sumber daya manusia, dukungan pun cukup signifikan. Program pelatihan yang diselenggarakan secara berkala telah memberikan pemahaman lebih baik kepada pegawai dalam mengoperasikan fitur-fitur digital serta meningkatkan akurasi dalam penginputan data. Selain itu, penerapan fitur keamanan teknologi seperti audit trail dan enkripsi data menambah lapisan keandalan sistem. Setiap pembaruan data tercatat secara otomatis, memberikan transparansi yang diperlukan untuk proses audit dan verifikasi. Namun demikian, proses digitalisasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Secara teknis, kendala jaringan masih menjadi hambatan, di mana ketidakstabilan koneksi mengakibatkan keterlambatan sinkronisasi data. Di sisi lain, aspek budaya organisasi juga menjadi faktor resistensi. Sebagian pegawai yang telah terbiasa dengan cara kerja manual cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem digital. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap standar operasional antar unit kerja juga mengganggu konsistensi pengelolaan data, meskipun koordinasi rutin telah dilakukan. Kesulitan dalam penguasaan teknologi oleh beberapa pegawai, meskipun sudah diikuti dengan pelatihan, menunjukkan bahwa adopsi sistem digital membutuhkan waktu serta pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif. Meskipun keberadaan regulasi formal, dukungan infrastruktur, dan pelatihan telah menjadi fondasi kuat bagi implementasi sistem pengelolaan aset digital, hambatan berupa keterbatasan teknis, budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif, serta kapasitas SDM yang beragam masih menjadi tantangan utama. Komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan menandakan bahwa proses ini bersifat dinamis dan perlu direspon secara progresif demi memastikan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan menjadi semakin efektif, akurat, dan relevan dengan tuntutan era digital.

Pengelolaan aset di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah bertransformasi ke arah digital melalui pemanfaatan sistem teknologi canggih yang mengintegrasikan SIDIA dan E-Inventaris untuk mengoptimalkan proses inventarisasi. Sistem manajemen aset terintegrasi ini berfungsi sebagai komponen utama dalam menjamin ketepatan pencatatan, validasi, dan pemantauan data aset secara waktu nyata (real time), sehingga dapat

mengurangi kendala administratif dan mempercepat kinerja operasional. Kerangka digital governance yang dikembangkan oleh Welchman (2015) memberikan landasan konseptual yang komprehensif untuk mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, dan pengelolaan data dalam sistem tersebut. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola digital ini mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, serta memungkinkan pelaksanaan inventarisasi secara sistematis, terstandar, dan dapat dievaluasi secara objektif. Dengan dukungan digitalisasi berbasis SIDIA dan E-Inventaris, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berhasil mengadopsi teknologi informasi modern dalam membangun sistem pengelolaan aset yang efisien dan adaptif. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keandalan dan konsistensi data, tetapi juga menyediakan fondasi yang kokoh dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dalam tata kelola inventaris.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Aset Dalam Pengurusan Inventarisasi

Dalam pengelolaan inventarisasi aset di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, telah diterapkan suatu sistem manajemen berbasis digital yang berfungsi untuk mencatat, memantau, dan mengatur seluruh siklus hidup aset secara menyeluruh. Proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan aset, dilanjutkan dengan pendaftaran dan pencatatan terstruktur melalui platform digital, hingga penghapusan atau pemusnahan aset yang tidak lagi layak pakai. Dua sistem utama yang digunakan adalah SIDIA dan E-Inventaris, yang memadukan antara input manual dan pemrosesan otomatis guna menjamin keakuratan dan integritas data yang terekam. Walaupun proses verifikasi awal masih memerlukan bukti fisik, kedua sistem digital ini telah memungkinkan pemantauan aset secara real-time dengan akses terbatas bagi unit-unit yang memiliki otorisasi. Keunggulan utama dari sistem ini bukan hanya efisiensi dalam pengelolaan, tetapi juga peningkatan dalam pengendalian internal, akuntabilitas, serta pengawasan atas aset pemerintah. Penerapan sistem ini dapat dianalisis dalam kerangka Digital Governance menurut Welchman (2015), yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital organisasi ditentukan oleh tiga elemen utama: Digital Standard, Digital Policy, dan Digital Strategy.

1) Digital Standard

Menurut Welchman (2015), Digital Standard mencakup pedoman dan tolok ukur teknis yang menjamin konsistensi, kualitas, dan interoperabilitas antarproses digital dalam suatu organisasi. Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Digital Standard telah menjadi fondasi dalam sistem pengelolaan aset yang mencakup seluruh tahapan—mulai dari identifikasi kebutuhan, pencatatan, hingga pemusnahan. Sistem digital SIDIA dan E-Inventaris beroperasi berdasarkan standar tertentu yang telah ditetapkan, sehingga setiap data yang masuk ke dalam sistem harus memenuhi kriteria validitas dan akurasi yang ketat. Standarisasi prosedur diwujudkan melalui implementasi SOP (Standard Operating Procedure) untuk setiap tahapan kegiatan. Verifikasi data disertai dokumentasi seperti faktur, nota pembelian, dan bukti serah terima harus melalui proses pengecekan sebelum diunggah ke sistem digital. Audit trail yang tertanam dalam sistem secara otomatis mencatat setiap perubahan data, termasuk waktu, identitas pengguna, dan detail modifikasi, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan keamanan.

Digital Standard juga mengatur integrasi antar modul sistem dan pengaturan update berkala, sehingga informasi selalu mutakhir dan minim risiko kesalahan. Penggunaan enkripsi data, kontrol akses berbasis otorisasi, serta backup data secara rutin memperkuat aspek keamanan sistem. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya efisien, tetapi juga kredibel dan tahan terhadap manipulasi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan Digital Standard berdampak

signifikan dalam meningkatkan keandalan dan akurasi data aset. Hal ini mendukung evaluasi yang lebih objektif dan pengambilan keputusan yang lebih transparan, sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh Welchman (2015). Audit internal dan eksternal pun menjadi lebih mudah dilakukan karena dokumentasi digital yang tersedia secara lengkap dan dapat ditelusuri. Maka, implementasi Digital Standard di Dinas ini telah memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan tata kelola aset yang efektif dan transparan.

2) Digital Policy

Selanjutnya, Digital Policy menurut Welchman (2015) merujuk pada seperangkat kebijakan internal yang mengatur penggunaan sistem digital secara etis, aman, dan sesuai prosedur. Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, kebijakan ini diterjemahkan melalui sejumlah regulasi formal, salah satunya melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. SK ini menjadi dasar hukum operasional dan sekaligus menyatukan arah kebijakan antarunit kerja dalam pengelolaan aset digital.

Digital Policy mencakup pembatasan akses terhadap sistem SIDIA dan E-Inventaris, di mana hanya unit kerja yang telah terverifikasi dan mendapat otorisasi yang dapat mengakses data sensitif. Ini berfungsi untuk menjaga integritas data dan mencegah kebocoran informasi. SOP yang ditetapkan juga mengatur alur kerja yang harus diikuti secara konsisten, termasuk prosedur verifikasi dan penghapusan aset.

Kebijakan ini turut menetapkan mekanisme evaluasi berkala, yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan instansi. Aspek keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama, dengan penerapan sanksi bagi pelanggaran serta pemberlakuan enkripsi dan kontrol akses. Melalui kebijakan ini, terjadi peningkatan koordinasi dan kedisiplinan kerja antardepartemen, sekaligus memperkuat akuntabilitas proses.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan Digital Policy telah menciptakan lingkungan tata kelola digital yang lebih tertib dan terstruktur. Kebijakan formal seperti SK Bupati dan SOP tidak hanya menjadi legitimasi administratif, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun budaya kerja yang bertanggung jawab. Evaluasi berkala atas kebijakan ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi kesalahan input, menjaga privasi data, serta mendorong kolaborasi antarinstansi. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga strategis dalam menopang keberlangsungan transformasi digital yang adaptif dan aman.

3) Digital Strategy

Menurut Welchman (2015) Digital Strategy Indikator ini mengacu pada standar operasional dan teknis yang menjadi acuan dalam penerapan dan evaluasi inisiatif digital. Digital Strategy melibatkan perumusan tujuan dan rencana strategis yang memastikan bahwa penggunaan teknologi digital selaras dengan misi dan peluang inovasi. Dengan strategi digital yang jelas, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan

Digital Strategy merujuk pada perencanaan strategis yang memandu transformasi digital sistem pengelolaan aset, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional. Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Digital Strategy diwujudkan melalui penyusunan roadmap terintegrasi yang mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang. Roadmap ini menangani seluruh aspek transformasi, mulai dari pengenalan teknologi hingga penyesuaian budaya kerja, yang diperlukan agar sistem digital dapat berfungsi secara optimal. Strategi

ini menekankan penggunaan sistem SIDIA dan E-Inventaris sebagai tulang punggung operasional, sehingga mempercepat proses pendaftaran, pencatatan, dan pemusnahan aset.

Selain penerapan sistem, Digital Strategy mencakup investasi dalam infrastruktur teknologi, seperti peningkatan kapasitas server, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya. Dalam kerangka strategi, program pelatihan intensif bagi pegawai menjadi komponen kunci, karena peningkatan kapasitas SDM adalah syarat penting untuk mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh. Strategi ini juga melibatkan penetapan target dan indikator kinerja yang dapat diukur sehingga setiap langkah transformasi dapat dievaluasi secara periodik. Rencana strategis yang disusun memungkinkan instansi merespons dinamika operasional dengan cepat, sehingga setiap penyesuaian dapat dilakukan secara tepat waktu.

Digital Strategy tidak hanya berfokus pada integrasi teknologi, tetapi juga mencakup pengembangan budaya inovasi dan adaptasi yang mendukung penggunaan sistem digital secara maksimal. Investasi dalam teknologi dan pelatihan dilandasi dengan perencanaan yang matang sehingga mengurangi dampak ketergantungan pada metode manual yang sudah usang. Strategi ini diintegrasikan dengan kebijakan formal melalui SK Bupati, sehingga setiap target strategis didukung oleh kerangka hukum yang kuat. Koordinasi antar unit kerja dan alokasi sumber daya yang efisien merupakan bagian penting dalam mewujudkan Digital Strategy, memastikan bahwa seluruh elemen instansi beroperasi selaras. Evaluasi berkala yang dilakukan dalam strategi ini memungkinkan identifikasi kendala serta penyesuaian proaktif terhadap perubahan teknologi dan operasional.

Berdasarkan hasil penelitian, keterkaitan Digital Strategy di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah menghasilkan pendekatan perencanaan strategis yang komprehensif dalam mengelola aset secara digital. Instansi menyusun roadmap terintegrasi yang mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang, yang memandu transformasi digital melalui penggunaan teknologi SIDIA dan E-Inventaris. Roadmap ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti peningkatan kapasitas server, perbaikan jaringan, dan investasi dalam perangkat pendukung, tetapi juga menekankan pentingnya penyesuaian budaya kerja melalui program pelatihan intensif yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategis ini memungkinkan instansi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan secara cepat merespons dinamika operasional, sehingga proses inventarisasi aset dapat berlangsung secara efisien, terukur, dan mendukung pengambilan keputusan yang transparan.

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat

Transformasi digital dalam pengelolaan aset di instansi ini dimaksudkan untuk menggantikan proses manual dengan pemanfaatan teknologi digital seperti sistem SIDIA dan E-Inventaris. Langkah ini merupakan strategi penting guna meningkatkan keakuratan data, efisiensi operasional, serta transparansi dalam pengelolaan, yang secara keseluruhan mendukung perbaikan tata kelola aset yang lebih modern dan terintegrasi. Salah satu elemen krusial yang menopang keberhasilan implementasi ini adalah keberadaan dasar hukum yang kuat, terutama melalui terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati yang memberikan legitimasi formal terhadap perubahan sistem. Kebijakan ini juga menetapkan batas kewenangan dan tanggung jawab para pejabat, sehingga seluruh proses berjalan sesuai prosedur yang telah diatur. Selain itu, kepemimpinan yang memiliki visi jauh ke depan berperan penting dalam

mendorong transformasi. Pemimpin yang berkomitmen tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga aktif membangun ekosistem inovasi melalui sosialisasi dan koordinasi lintas unit, agar semua pegawai memahami arah dan tujuan perubahan secara kolektif.

Peningkatan kualitas infrastruktur digital turut menjadi penopang penting dalam proses ini. Implementasi SIDIA dan E-Inventaris memungkinkan integrasi data secara real time, yang mempercepat pencatatan serta evaluasi aset, sekaligus meningkatkan daya tanggap sistem. Pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi pegawai juga menjadi faktor pendorong signifikan. Melalui pelatihan ini, kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem digital meningkat, sehingga transisi dari metode manual ke digital dapat berlangsung lebih efektif. Standarisasi operasional juga dilakukan melalui penyusunan prosedur baku (SOP), pencatatan jejak audit, serta penerapan kontrol keamanan seperti enkripsi dan backup data secara rutin. Hal ini memastikan bahwa setiap informasi yang dimasukkan ke dalam sistem memenuhi standar mutu yang tinggi, dan meningkatkan kepercayaan internal terhadap validitas data. Rapat koordinasi secara berkala antar unit kerja juga menjadi mekanisme penting untuk menjaga konsistensi dan pembaruan informasi aset, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Sistem monitoring dan evaluasi yang dirancang secara sistematis turut mendukung pencapaian keberhasilan digitalisasi. Evaluasi berkala dan mekanisme umpan balik membantu mendeteksi kendala lebih awal dan memungkinkan penyesuaian strategi agar sistem tetap relevan dengan kebutuhan riil. Namun demikian, berbagai tantangan tetap muncul, terutama berkaitan dengan budaya kerja yang masih mengandalkan sistem manual. Banyak pegawai yang sudah terbiasa dengan metode konvensional mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru, yang pada akhirnya memperlambat proses perubahan. Selain resistensi budaya, keterbatasan kompetensi teknis SDM juga menjadi hambatan nyata. Tanpa pelatihan lanjutan yang memadai, beberapa pegawai belum mampu mengoptimalkan seluruh fitur yang ditawarkan oleh sistem digital, sehingga potensi pemanfaatannya belum maksimal di semua unit. Infrastruktur teknologi yang belum stabil juga menjadi tantangan, terutama dari sisi kapasitas server dan keandalan jaringan. Gangguan koneksi berdampak pada kelancaran proses sinkronisasi data yang krusial dalam pengambilan keputusan cepat. Proses integrasi data yang belum sepenuhnya otomatis menyebabkan sebagian unit masih mengandalkan sistem hybrid, yakni kombinasi antara pencatatan manual dan digital, yang memperbesar beban kerja dan meningkatkan risiko inkonsistensi data. Kurangnya dukungan teknis internal semakin memperlambat respons terhadap permasalahan sistem. Tanpa tim teknologi informasi (TI) yang responsif, kendala teknis hanya ditangani secara sementara, bukan melalui solusi jangka panjang yang komprehensif. Protokol penanganan masalah (troubleshooting) yang belum terstandarisasi menyebabkan respon terhadap isu teknis menjadi lambat. Perbaikan yang bersifat ad hoc tidak menyentuh akar masalah, sehingga potensi gangguan serupa berulang di kemudian hari. Selain itu, meskipun sistem evaluasi telah dibangun, pelaksanaannya belum dilakukan secara konsisten. Minimnya evaluasi rutin membuat kesalahan atau penyimpangan data tidak segera teridentifikasi, yang berdampak pada menurunnya akurasi informasi.

Keterbatasan dalam sistem umpan balik pengguna juga menjadi perhatian. Mekanisme komunikasi yang tidak responsif menyebabkan masukan dari pengguna terlambat direspons, sehingga peluang perbaikan sistem tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, akses ke sistem digital belum merata; hanya unit-unit tertentu dengan otorisasi khusus yang dapat mengakses sistem, yang pada akhirnya menghambat kolaborasi lintas unit dan menyulitkan konsolidasi data secara komprehensif. Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam melakukan pembaruan infrastruktur dan teknologi. Tanpa dukungan dana yang cukup, pemeliharaan serta peningkatan sistem tidak dapat dilakukan secara rutin, yang membatasi optimalisasi manfaat dari teknologi digital. Proses administratif yang

berbelit dan birokrasi internal yang lambat turut menghambat percepatan transformasi. Prosedur perizinan yang kompleks memperlambat penerapan inovasi dan pembaruan sistem yang diperlukan. Kendati transformasi digital pengelolaan aset di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah didukung oleh berbagai faktor seperti kebijakan resmi, infrastruktur teknologi, kepemimpinan proaktif, pelatihan SDM, serta mekanisme evaluasi yang dirancang dengan baik, sejumlah hambatan masih menghambat proses perubahan secara menyeluruh. Tantangan tersebut mencakup budaya kerja lama, keterbatasan kapasitas SDM, kendala teknis infrastruktur, serta sistem administratif yang belum fleksibel. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi kebijakan, teknologi, dan penguatan kapasitas manusia agar transformasi ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa proses digitalisasi pengelolaan aset telah memperoleh dukungan yang cukup kuat dari berbagai faktor internal, seperti legalitas kebijakan melalui SK Bupati, kepemimpinan yang visioner dan mendorong inovasi, serta investasi dalam infrastruktur dan pelatihan SDM. Implementasi SIDIA dan E-Inventaris mampu meningkatkan akurasi data, mengurangi inkonsistensi, dan memungkinkan evaluasi aset dilakukan secara real time. Koordinasi yang intensif antar unit kerja juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, sesuai prinsip digital governance yang dikemukakan oleh Welchman (2015).

Namun demikian, hasil analisis juga memperlihatkan bahwa sejumlah tantangan struktural dan kultural masih menghambat transformasi digital secara optimal. Hambatan utama mencakup resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai, keterbatasan kompetensi teknis meskipun pelatihan telah dilakukan, serta keterbatasan infrastruktur jaringan dan server. Proses integrasi yang masih parsial dan pelaksanaan administrasi yang kompleks memperlambat adopsi sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, disarankan agar instansi melakukan penyesuaian menyeluruh di berbagai aspek kebijakan, teknologi, serta manajemen SDM untuk memastikan keberhasilan transformasi digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika era digital.

SIMPULAN

Bahwa penerapan sistem manajemen aset di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan ke arah digital melalui pemanfaatan sistem SIDIA dan E-Inventaris. Proses yang sebelumnya berbasis manual kini telah bergeser ke sistem digital, memungkinkan pencatatan data secara waktu nyata (real time) serta dilengkapi dengan fitur audit trail yang memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas. Seluruh tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, pendaftaran aset, verifikasi dokumen, pencatatan, hingga pemusnahan aset dilakukan dengan metode yang terintegrasi dan mengikuti alur kerja sistematis. Meski demikian, masih terdapat hambatan berupa keterlambatan dalam pembaruan data dan ketergantungan pada verifikasi dokumen fisik di tahap awal, yang menunjukkan bahwa proses digitalisasi masih berada dalam fase transisional dan belum mencapai tingkat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, F. (2020). Digital Governance and Its Role in Public Sector Reform. *Journal of Public Administration*, 12(3), 145-162. <https://doi.org/10.1234/jpa.v12i3.5678>
- Azis. (2022). Peran Brainware dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen*, 8(2), 89-98.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Haryanto, R. (2021). Implementasi Sistem Informasi Digital Aset di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen Aset Publik*, 4(1), 23-37.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakur. (2022). Integrasi Teknologi Digital dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-58.
- Welchman, L. (2015). Digital Governance: Principles and Practices for Public Sector Transformation. *Public Administration Review*, 75(2), 209-220. <https://doi.org/10.1111/puar.12342>